

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sedang giat-giatnya dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini dilaksanakan melalui program jangka panjang secara bertahap. Tujuan akhir dari pembangunan ini adalah meningkatkan taraf hidup bangsa sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai tujuan-tujuan itu dan agar pembangunan daerah selaras dengan pembangunan nasional, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang disesuaikan dengan prioritas, kondisi dan potensi yang ada di masing-masing daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini tentu diperlukan pula perencanaan, koordinasi dan keterpaduan antar sektor, antar sektor dalam daerah, baik itu daerah tingkat II maupun daerah tingkat I.

Secara makro pertumbuhan atau kenaikan PDRB dari tahun ketahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah. Dimana dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor sebagai berikut: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Galian, Sektor Industri, Sektor Listrik, Gas dan Air Minum, Sektor Bangunan dan Konstruksi, Sektor

Perdagangan, Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Sektor Jasa

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi diatas. Kecilnya kontribusi pendapatan sektor ekonomi merupakan hasil dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan sektoral yang dilaksanakan didaerah.

Peningkatan PDRB ini didukung oleh kontribusi berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh semua propinsi di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk terus mendukung serta menciptakan iklim kondusif agar setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Bentuk dukungan ini bisa dilakukakan dengan cara memberikan bantuan keuangan maupun bantuan berupa tenaga ahli yang didatangkan dari pusat, sehingga hasil pembangunan di daerah tersebut juga dapat dikontribusikan ke pembangunan yang dilaksanakan di daerah lain di Indonesia, sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada tabel di bawah tampak bahwa Pendapatan Daerah Regional Bruto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing daerah telah berhasil dalam melaksanakan strategi perencanaan dan pembangunan. Tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah Regional Bruto yang berbeda-beda di setiap propinsi menunjukkan bedanya corak pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing propinsi. Untuk

mewujudkan bedanya corak pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terealisasi dengan baik, maka setiap propinsi harus dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada dan juga diperlukan peran besar pemerintah yang mampu mendukung pembangunan tersebut.

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993
Menurut Propinsi Tahun 1996-1999 (Jutaan Rupiah)

Propinsi	1996	1997	1998	1999
Dista Aceh	11.463.291	11.444.454	9.913.390	90.913.390
Sumatera Utara	23.714.738	25.065.405	22.898.425	22.898.425
Sumatera Barat	7.609.545	8.000.663	7.580.962	7.580.962
Riau	19.808.076	20.433.959	20.311.406	20.311.406
Jambi	3.145.342	3.268.456	3.181.314	3.181.314
Sumatera Selatan	13.521.163	14.207.488	13.659.311	13.659.311
Bengkulu	1.688.755	1.740.586	1.657.639	1.657.636
Lampung	6.914.211	7.201.338	6.877.825	6.877.825
DKI Jakarta	66.164.802	69.543.445	56.638.192	56.638.192
Jawa Barat	68.243.530	71.568.924	60.036.248	60.036.248
Jawa Tengah	41.862.204	43.129.839	39.362.405	39.362.405
Dista Yogyakarta	5.106.349	5.286.367	4.844.963	4.844.963
Jawa Timur	61.752.469	64.346.958	54.270.012	54.270.012
Bali	7.141.773	7.556.533	7.299.401	7.299.401
Kalimantan Barat	6.714.068	7.219.744	7.066.058	7.066.058
Kalimantan Tengah	4.036.205	4.290.178	3.986.710	3.986.710
Kalimantan Selatan	5.956.054	6.228.621	5.978.327	5.978.327
Kalimantan Timur	19.792.193	20.670.725	21.383.360	21.383.360
Sulawesi Utara	3.574.698	3.767.016	3.887.112	3.887.112
Sulawesi Tengah	2.212.649	2.316.865	2.287.380	2.287.380
Sulawesi Selatan	9.485.863	9.893.420	9.631.076	9.631.076
Sulawesi Tenggara	1.561.002	1.644.024	1.588.457	1.588.457
NTB	3.195.295	3.363.240	3.318.723	3.318.723
NTT	2.685.534	2.836.328	2.834.510	2.834.510
Maluku	2.981.248	3.085.740	2.121.882	2.121.882
Irian Jaya	6.983.390	7.501.814	8.148.250	8.148.250
Jumlah 26 propinsi	407.314.933	425.614.130	375.948.737	380.763.336
Indonesia	413.797.915	433.245.879	376.892.534	378.051.431

Sumber: Pendapatan Nasional Indonesia, BPS, 2000

Jika pertumbuhan ekonomi setiap daerah dapat ditingkatkan, hal tersebut tentunya sangat mendukung peningkatan pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh peningkatan Pendapatan Daerah Regional Bruto.

Seperti kita ketahui krisis ekonomi berawal pada tahun 1997 dan 1998 pada saat itu banyak perekonomian yang mengalami penurunan dengan drastis dan hal itu terjadi juga pada propinsi Sumatera Selatan

Dalam tabel dibawah ini terlihat bahwa Propinsi Sumatera Selatan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun pada tahun 1998 mengalami penurunan yang sangat tajam.

Tabel 1.2
Pendapatan Daerah Regional Bruto Propinsi Sumatera Selatan

Tahun	Pertumbuhan PDRB (%)	PDRB (Miliar Rp)
1996	8.03	13,521
1997	5.08	14,207
1998	-6.81	13,239
1999	3.17	13,659

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, BPS Sumsel 2000

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 1997 pertumbuhan PDRB mengalami penurunan dari 8.03% menjadi 5.08% dan pada tahun 1998 penurunan PDRB terjadi sangat drastis sampai mencapai -6.81% hal ini terjadi pada krisis moneter. Tapi pada tahun 1999 propinsi Sumatera Selatan mampu menaikkan pendapatannya sebesar 3,17%

Saat ini pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan karena pada masa reformasi dan kompetisi global perlu reorientasi yang bersifat pemberdayaan (*empowering*) dengan inti otonomi daerah yang realistis dan mencari peluang-peluang baru sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Dengan demikian diperlukan kejelian pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensinya untuk mandiri secara ekonomi. Kapabilitas bisnis dan masyarakat harus diperkuat dan otomatis memperkuat kapabilitas pemerintah daerah juga, melalui hal ini akan mampu menumbuhkan kemandirian daerah.

Melalui identifikasi sektor unggulan yang tepat maka pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, penggunaan segenap potensi ekonomi dapat semakin efektif dan efisien, untuk menggerakkan otonomi daerah dan modal dasar untuk mengembangkan otonomi Propinsi Sumatera Selatan yang lebih luas agar mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya dalam memasuki era globalisasi perdagangan bebas.

Dengan adanya tekanan krisis ekonomi nasional yang berdampak pada defisitnya anggaran pemerintah pusat serta adanya otonomi daerah, apakah pemerintah daerah mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian diprioritaskan antara tahun 1995 sampai dengan tahun 1999.

1.2 Rumusan Masalah

Dari hal diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat pertumbuhan sektor ekonomi propinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan sektor ekonomi seluruh propinsi di Sumatera.
2. Sektor apa saja yang berpotensi dan potensial (sektor basis) dalam struktur perekonomian Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan sektor ekonomi propinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan sector ekonomi seluruh propinsi di Sumatera.
2. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang berpotensi dan potensial (sektor basis) dalam struktur perekonomian Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadi tambahan informasi dan bahan evaluasi agar dapat lebih memantapkan peran perencanaan daerah dimasa-masa mendatang.
2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pengumpulan data

Metode yang ditempuh untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam mendukung analisa ini melalui pencatatan angka-angka dan data-data sekunder, yaitu data –data yang berasal dari laporan –laporan penelitian dan instansi terkait yang sesuai dengan masalah yang diteliti, diantaranya diperoleh dari :

- a. Badan Pusat Statistik
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Selatan.

1.5.2 Jenis data

Data yang dibutuhkan adalah :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) propinsi di Sumatera tahun 1995-1999 atas dasar harga konstan tahun 1993.

2. Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan tahun 1995-1999 atas dasar harga konstan tahun 1993.

Data yang dijadikan obyek penelitian yaitu 9 sektor ekonomi di propinsi Sumatera Selatan yang dikelompokkan dalam:

- Kelompok sektor primer
 1. Sektor pertanian
 2. Sektor pertambangan dan penggalian
- Kelompok sektor sekunder
 3. Sektor industri pengolahan
 4. Sektor listrik, gas dan air minum
 5. Sektor bangunan
- Kelompok sektor tersier
 6. Sektor perdagangan
 7. Sektor Angkutan dan komunikasi
 8. Sektor bank dan lembaga keuangan
 9. Sektor Jasa

1.6.3 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan alat analisa LQ (*Location Quotient*) dan S-S (*Shift Share*).

1. Analisis *Shift Share*

Yaitu suatu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang menganalisa bagaimana pangsa masing-masing serta pertumbuhan perekonomian daerah dari tahun ketahun terhadap perekonomian secara nasional dengan cara membandingkan kinerja dan sektor ekonomi di daerah dengan kinerja dan sektor ekonomi nasional. Teknik *shift share* ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian disuatu daerah dengan laju pertumbuhan sektor perekonomian nasional.

Teknik analisa *shift share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, yaitu pendapatan atau output sektor-sektor ekonomi daerah dalam waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh: pertumbuhan nasional (N); (industri mix) bauran industri (M); keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (*share*), pengaruh bauran industri disebut *proportional shift* atau bauran komposisi, dan akhirnya pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan *differential shift* atau *regional share*. Karena itu analisis ini disebut Teknik analisis *shift share*.

Bentuk umumnya : $D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$

Untuk sektor i diwilayah j

$$D_{ij} = Y_{t_{ij}} - Y_{(t-1)_{ij}}$$

$$N_{ij} = Y_{(t-1)_{ij}} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = Y_{(t-1)_{ij}} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = Y_{(t-1)_{ij}} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

D = Variabel wilayah

N = Pertumbuhan nasional

M = Bauran industri

C = Keunggulan kompetitif

Y_{ij} = Pendapatan di sektor i di wilayah j

Y_{in} = Pendapatan sektor i ditingkat nasional

t = Pendapatan tahun analisis

Dimana r_{ij} , r_{in} , r_n mewakili laju pertumbuhan wilayah dan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = \frac{(Y_{t_{ij}} - Y_{(t-1)_{ij}})}{Y_{(t-1)_{ij}}}$$

$$r_{in} = \frac{(Y_{tin} - Y_{(t-1)in})}{Y_{(t-1)in}}$$

$$r_n = \frac{(Y_{tn} - Y_{(t-1)n})}{Y_{(t-1)n}}$$

Keterangan :

r_{ij} = Laju pertumbuhan pada sektor i di wilayah j

r_{in} = Laju pertumbuhan pada sektor i di sektor nasional

r_n = Laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional

Secara keseluruhan wilayah , persamaan untuk sektor i di wilayah j adalah:

$$D_{ij} = Y_{(t-1)ij} \cdot r_n + Y_{(t-1)ij} (r_{in} - r_n) + Y_{(t-1)ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Pengaruh bauran industri untuk sektor i akan positif disemua wilayah ($r_{in} > r_n$) demikian pula pengaruh bauran industri menjadi nol bila ($r_{in} = r_n$), atau negatif bila ($r_{in} < r_n$). Selanjutnya keunggulan kompetitif untuk sektor i di wilayah j dapat positif, nol ataupun negatif, tergantung apakah pertumbuhan regional disetiap sektor lebih cepat daripada ($r_{ij} > r_{in}$), sama dengan ($r_{ij} = r_{in}$) atau lebih lambat ($r_{ij} < r_{in}$)

daripada pertumbuhan disektor yang bersangkutan pada tingkat nasional.

Selain itu, suatu keunggulan kompetitif yang positif (negatif) mempunyai implikasi bahwa share suatu wilayah atas sektor tertentu, naik (turun) selama kurun waktu tertentu.

2. Analisis *Location Quotient*

Teknik analisis LQ merupakan salah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menganalisa sektor potensial atau sektor basis dalam perekonomian suatu daerah dengan cara mengukur konsentrasi suatu sektor ekonomi, yaitu dengan membandingkan peranan sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah dengan sektor sejenis dalam perekonomian secara nasional.

Rumus menghitung dengan teknik LQ

$$LQ = \frac{y_i/y_t}{Y_i/Y_t}$$

Keterangan:

LQ	-	Koefisien LQ
y_i	=	Pendapatan di sektor i di suatu daerah
y_t	=	Pendapatan total daerah (PDRB)
Y_i	=	Pendapatan di sektor i di tingkat nasional
Y_t	=	Pendapatan total ekonomi nasional (PDB)

Klasifikasi LQ:

$LQ > 1$	Merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor tersebut disuatu daerah lebih besar bila dibandingkan dengan sektor sejenis secara nasional.
$LQ = 1$	Kemampuan produksi sektor tersebut sama dengan sektor sejenis secara nasional.
$LQ < 1$	Bukan merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor tersebut lebih kecil bila dibandingkan sektor sejenis secara nasional.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diorganisir sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang deskripsi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian, hipotesis, metode penelitian, alat analisis dan sistematika penelitian.

BAB II 1. Kajian Pustaka

2. Landasan Teori

- a. Konsep dan teori pertumbuhan ekonomi
- b. Perencanaan Pembangunan
- c. Perencanaan di NSB
- d. Perencanaan Pembangunan di Indonesia
- e. Pembangunan daerah
- f. Konsep dan teori analisis
- g. *Location Quotient*
- h. *Shift Share*

BAB III Gambaran Umum Daerah Penelitian

Akan diuraikan Letak Geografis daerah Sumatera Selatan, keadaan alam, kondisi penduduk Sumatera Selatan, kondisi ketenaga kerjaan Sumatera Selatan.

BAB IV Analisis Data

Akan dilakukan penyajian data. Kemudian dengan bantuan komputer akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*.

Dari hasil perhitungan akan dianalisis sesuai dengan landasan teori yang digunakan.

BAB V Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Yani Kuryani

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi sektoral sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 1998 oleh Yani Kuryani, judul skripsinya adalah "Analisis Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Propinsi Jawa Tengah". Dengan menggunakan Analisis *Shift Share* dan *Location Quotient*, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sektoral yang dialami oleh Propinsi Jawa Tengah selama periode 1986 – 1995, apakah yang menjadi basis perekonomian Jawa Tengah dan bagaimana pergeseran atau perubahan struktur perekonomian Jawa Tengah selama periode 1986 – 1995. Berdasarkan hasil penelitian *Shift Share* tahun 1986 – 1995, menunjukkan bahwa total laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Propinsi Jawa Tengah adalah Positif. Demikian juga jika dilihat dari pengaruh komponen pertumbuhan nasional (Nij), pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Jawa Tengah juga menunjukkan nilai yang positif, artinya kontribusi sektor ekonomi Propinsi Jawa Tengah pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan kontribusi sektor ekonomi sejenis secara nasional.

Berdasarkan potensi yang dimiliki daerah, dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* terhadap sembilan sector lapangan usaha kegiatan perekonomian di Propinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa sektor yang dapat diandalkan dalam pertumbuhan PDRB selama periode 1986 – 1995 didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai LQ lebih besar dari 1 ($LQ > 1$). Selama periode Analisa *Location Quotient* tampak adanya perubahan struktur dalam perekonomian Jawa Tengah, jika sebelumnya sektor pertanian merupakan sektor yang kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB Jawa Tengah paling Besar, maka dewasa ini sektor industri pengolahanlah yang mempunyai peranan atau kontribusi terbesar dalam pertumbuhan PDRB Jawa Tengah atau *Leading Sector* (sektor pemimpin). Sedangkan sector-sector lain meskipun kontribusinya kecil tetapi mempunyai potensi cukup besar untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang.

2.1.2 Penelitian Heriyanto

Penelitian yang berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto pada tahun 1999, dengan judul "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Jambi". Menurut hasil penelitian Heriyanto selama periode analisis tahun 1988 – 1997, dilihat dari analisis *Shift Share* dan *Location Quotient* tidak tampak adanya perubahan struktur dalam perekonomian Propinsi Jambi. Sektor

Pertanian masih merupakan sektor andalan dan memiliki potensi serta kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Propinsi Jambi. Jika dilihat dari kontribusi kelompok sektor, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi kelompok sektor tertier paling besar perannya dalam pembentukan PDB dan PDRB Propinsi Jambi. Tapi meskipun kontribusinya cukup, arah pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. Begitu pula untuk sektor primer pertumbuhannya terus mengalami penurunan, sedangkan kelompok sekunder mengalami kenaikan pertumbuhan setiap tahunnya.

Diatas telah disajikan beberapa penelitian yang sebelumnya, mengenai pertumbuhan ekonomi sektoral dilihat dari 9 sektor ekonomi menurut lapangan usaha dan atas dasar harga konstan, dengan membandingkan antara PDRB suatu wilayah tertentu dengan PDB secara nasional. Dimana laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah.

Perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi suatu daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur perekonomian suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi.

2.2 Landasan Teori Tulisan

2.2.1 Konsep dan Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan ekonomi

Dalam membahas pertumbuhan ekonomi, sebaiknya ditinjau lebih dulu pengertian dari perkembangan atau pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya sumber peningkatan output masyarakat tetapi mempunyai sifat yang berbeda.

Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi merupakan sumber kemajuan ekonomi yang secara historis paling penting. Perkembangan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik dan teknologi yang menunjang kualitas para wiraswastawan. Dengan adanya lingkungan yang menunjang kreatifitas, maka akan timbul beberapa wiraswastawan yang menjadi pioneer dalam mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi. Bagi mereka yang berhasil akan dikatakan telah melakukan inovasi baru.

Pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznet didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis-jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi

dan penyesuaian kelembagaan ideologis yang diperlukan. Dari definisi ini terkandung tiga komponen.

Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu daerah terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan suatu negara atau daerah dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara perkembangan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi terletak pada penekanan pembahasannya, yakni perkembangan ekonomi lebih menekankan pada adanya inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta yang pada akhirnya akan menimbulkan proses imitasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi lebih ditekankan pada perubahan atau perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun.

Beberapa ekonom lain membedakan pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*) dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sebagai berikut: Pembangunan ekonomi diartikan sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.
2. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus diperbandingkan pendapatan regional (PDRB) dari berbagai tahun. Dalam membandingkan PDRB perlu diperhatikan bahwa perubahan nilai PDRB yang berlaku dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi secara riil
2. Perubahan harga-harga.

Adanya pengaruh dua faktor ini disebabkan karena pendapatan daerah yang berlaku pada berbagai tahun dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian tumbuh, perlu ditekankan karena perubahan yang sebenarnya berlaku dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun secara riil. Untuk mencapai tujuan ini pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan daerah harus dihilangkan.

Kemudian dalam mengkaji teori pertumbuhan ekonomi banyak sekali para ahli yang telah membuat teori-teori pertumbuhan. Teori-teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok teori-teori klasik dan modern.

2.2.1.2 Teori –teori Klasik

Teori klasik meliputi teori pertumbuhan dari Adam Smith, David Richardo dan Arthur Lewis. Model pertumbuhan dari teori-teori klasik didasari pada 2 faktor utama, yaitu pertumbuhan output total (GDP) dan pertumbuhan penduduk. Kedua faktor ini yang menjadi kekuatan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan. Adam Smith, menyatakan bahwa peningkatan output sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan pekerja (spesialisasi). Penerapan sistem pembagian kerja yang tetap berdasarkan ketrampilan pekerja dan penggunaan mesin-mesin yang dapat memudahkan dan mempercepat serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Boediono,1992:53)

Apabila ketiga metode tersebut di atas diterapkan untuk meningkatkan output, maka harus dilakukan akumulasi kapital. Akumulasi kapital dapat mendorong tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Karenanya Adam Smith juga menekankan pada akumulasi kapital dengan persamaan:

$$Y = f(K,P)$$

Dimana:

Y - Output

K - Stok kapital

P = Tingkat produktivitas perkapita

Persamaan tersebut di atas menunjukkan bahwa stok kapital dan tingkat produktivitas per pekerja secara langsung dapat menaikkan output. Apabila output meningkat pada periode itu, maka sebagian dari kenaikan output akan diinvestasikan. Apabila output pada periode pertama meningkat dan sebagian dari output diinvestasikan maka stok kapital akan meningkat pada periode selanjutnya. Proses pertumbuhan output ini akan terus berlanjut pada periode berikutnya sampai pada batas penggunaan sumber daya alam dan produktivitas per pekerja mencapai tingkat yang optimum. Pada tahap ini proses pertumbuhan akan berhenti dan perekonomian akan berada pada posisi stasioner (tetap). Untuk menghindarinya, Adam Smith menekankan perlunya perluasan pasar, disamping masyarakat diberi kebebasan untuk memilih barang yang akan dikonsumsi.

Teori pertumbuhan David Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith, bahwa untuk memperlambat menurunnya marginal produk (*The Law of*

Diminishing marginal Return) maka model yang dikembangkan Adam Smith harus ditambah dengan pengembangan teknologi. Penggunaan teknologi pada proses produksi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga output yang dihasilkan akan meningkat dan pemilik modal pun akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan pekerja akan mendapatkan upah yang lebih tinggi disamping itu keuntungan yang diperoleh pemilik modal dapat diinvestasikan sehingga stok kapital akan meningkat. Dengan demikian dapat menghambat proses terjadinya kenaikan hasil yang semakin menurun (*The Law of Diminishing Return*)

2.2.1.3 Teori-teori Modern

Teori-teori modern mencakup empat sub golongan, yaitu:

1. Teori pertumbuhan yang berawal dari teori makro Keynes, termasuk disitu teori pertumbuhan Harrod-Domar.
2. Teori pertumbuhan Neo-klasik yang diawali oleh Robert Solow dan Trevor Swan.
3. Teori pertumbuhan optimum, yaitu teori yang bertujuan mencari jalur yang paling baik (optimum) bagi suatu perekonomian nasional.

4. Teori pertumbuhan dengan uang, teori ini dikembangkan sebagai lanjutan dari teori pertumbuhan Neo-klasik tapi tambahannya adalah uang.

Teori pertumbuhan Keynes juga relevan dengan kebijakan yang diambil di negara sedang berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes menentukan pentingnya tabungan dan investasi dengan campur tangan pemerintah. Untuk menstabilkan keduanya dapat dilihat dari berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada investor dalam negeri maupun investor asing.

Menurut Keynes tingkat pendapatan nyata tertentu dapat dipertahankan dalam sistem yang sederhana selama penanaman modal tetap berada pada suatu tingkat yang tidak berubah. Jika tingkat investasi naik, maka pendapatan equilibrium akan naik beberapa kali lipat dari kenaikan investasi. Investasi juga memperbesar pula kemampuan produksi. Ini tidaklah diakibatkan oleh sekedar penambahan investasi, tapi juga oleh jumlah investasi bersih dalam tiap-tiap masa.

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan pengembangan teori makro Keynes dari analisis jangka pendek menjadi analisis jangka panjang tentang syarat-

syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang secara mantap (*steady growth*). Dalam menganalisis pertumbuhan secara mantap Harrod-Domar mendasarkan pada beberapa asumsi:

1. Perekonomian berada dalam kondisi pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapital yang digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua faktor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
3. Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional.
4. MPS, COR, ICOR konstan.

COR dan ICOR menggambarkan hubungan antara tingkat output dengan investasi (tambahan kapital) yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat output tersebut. Dalam konsep matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{COR} = K/Y$$

$$\text{ICOR} = \Delta K/\Delta Y$$

Keterangan:

K = stok kapital

Y = output/ pendapatan nasional

Pada kondisi keseimbangan, tabungan nasional (S) sama dengan investasi nasional (I) sehingga:

$$S = I$$

$$S = k$$

$$S = \text{COR} \cdot Y$$

$$S = \text{MPS} \cdot Y$$

$$\text{Maka } \text{MPS} \cdot Y = \text{COR} \cdot \Delta Y$$

$\Delta Y/Y$ = tingkat pertumbuhan output/persentase perubahan output

$$\Delta Y/Y = \text{MPS}/\text{COR}$$

$\Delta Y/Y$ = persamaan Harrod-Domar yang disederhanakan.

Jadi tingkat pertumbuhan output ditentukan bersama oleh MPS dan COR. Tingkat pertumbuhan output berhubungan positif dengan MPS, sedang COR berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pertumbuhan output.

Sebenarnya tingkat pertumbuhan output riil tergantung pada tingkat produktivitas investasi yang dapat dihitung dengan I/COR . I/COR menggambarkan rasio output kapital atau rasio output investasi, sehingga persamaan $\Delta Y/Y = \text{MPS}/\text{COR}$ dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{MPS} \cdot I/\text{COR} = I/Y \cdot \Delta Y/I$$

$$MPS.I/COR = AY/Y$$

Sehingga :

$$MPS = I/Y$$

Teori ini mengasumsikan adanya perubahan akan teknologi yang masuk dalam perekonomian dalam wujud barang-barang modal yang baru dengan demikian laju pertumbuhan teknologi bergantung pada laju pertumbuhan investasi, pernyataan ini merupakan kritik terhadap teori Harrod-Domar. Sehingga fungsi produksi pada model pertumbuhan neo-klasik secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = A.f(k,n)$$

Keterangan:

A = indeks perubahan teknologi yang berubah sepanjang waktu, tapi pada saat ini dianggap konstan.

k = stok kapital

n = penawaran tenaga kerja

Fungsi produksi diasumsikan memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, produksi mengikuti pendapatan pada skala yang konstan (*constan return to scale*). Kedua, produksi mengikuti hukum hasil yang semakin menurun (*the law of diminishing return*).

2.2.2 Perencanaan Ekonomi

2.2.2.1 Pengertian Perencanaan

Pengertian tentang perencanaan, yaitu perencanaan merupakan suatu teknik atau cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan yang telah ditentukan dan dirumuskan oleh suatu badan perencanaan di tingkat pusat. Tujuan-tujuan tersebut dapat berupa tujuan ekonomi, politik, ataupun tujuan militer yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (Arsyad,1993:hal 17)

2.2.2.2 Ciri-ciri Perencanaan

Perencanaan pembangunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Arsyad,1993: hal 17):

1. Mencerminkan suatu perencanaan untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (*steady growth*). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Mencerminkan suatu perencanaan untuk meningkatkan pendapatan dan perubahan struktur ekonomi.Hal ini disebut usaha diversifikasi ekonomi.
3. Adanya usaha perluasan kesempatan kerja.
4. Adanya usaha pemeratan pembangunan

5. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
6. Adanya usaha secara terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi.
7. Adanya usaha yang dilakukan agar kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan pada kemampuan nasional.

2.2.2.3 Unsur-unsur Pokok dalam Perencanaan Pembangunan

Unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan tujuan dan strategi dasar perencanaan pembangunan
2. Adanya kerangka makro dimana dalam hal ini dihubungkan berbagai variabel pembangunan serta implikasi dari hubungan tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
4. Adanya uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten, misalnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan anggaran dan kebijakan harga.

5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

2.2.2.4 Fungsi Perencanaan

Perencanaan berfungsi sebagai alat untuk mencapai sasaran yang lebih baik. Fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu pengeralihan kegiatan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek, perkembangan dan hambatan-hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan adanya perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segala pentingnya tujuan.

5. Sebagai alat untuk mengukur standar mengadakan pengawasan evaluasi.

Dari sudut pandang ekonomi perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat dihindari adanya pemborosan.
2. Agar pertumbuhan ekonomi lebih mantap dan berkesinambungan.
3. Agar tercapainya stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur.

2.2.2.5 Proses penyusunan Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan pembangunan dibagi dalam 4 tahap, yaitu:

1. Penyusunan rencana meliputi:
 - Tinjauan keadaan
 - Perkiraan keadaan masa yang akan datang
 - Penetapan tujuan perencanaan
 - Identifikasi kebijakan
 - Persetujuan perencanaan
2. Penyusunan program perencanaan
3. Pelaksanaan perencanaan

4. Pengawasan atas pelaksanaan

2.2.3 Model Perencanaan Pembangunan di Negara Sedang Berkembang

Terdapat beberapa model perencanaan pembangunan di Negara sedang Berkembang (NSB) seperti Indonesia, yaitu (Soekartawi, 1990:25):

1. Perencanaan Regional

Perencanaan ini dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan perencanaan yang ada di daerah tersebut. Bila perencanaan regional berkembang dengan baik, maka diharapkan kemandirian daerah dapat dimantapkan sehingga daerah tersebut tidak terlalu bergantung pada pusat.

2. Perencanaan Sektoral

Perencanaan sektoral sering diistifahkan dengan perencanaan departemen misalnya perencanaan bidang pertanian. Perencanaan ini sifatnya lebih spesifik disesuaikan dengan masing-masing sektor.

3. Perencanaan Proyek

4. Perencanaan ini di Indonesia di sebut perencanaan APBN/APBD, karena dilaksanakan dalam waktu sekitar 1

5. Perencanaan Terpadu
6. Perencanaan ini sering diistilahkan sebagai perencanaan komprehensif (*Intergrated Planning*), maksud dari perencanaan ini adalah untuk menghindari perencanaan yang saling bertabrakan satu sama lain. Contoh dari perencanaan terpadu ini adalah Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang).

Perencanaan daerah/regional yang dilakukan dalam memacu laju pertumbuhan suatu daerah tidak akan terlepas dari arah pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional, karena dengan kerjasama dan keterpaduan yang erat antara daerah. Keadaan tersebut akan tercapai bila pemerintah ikut campur tangan terutama dalam mendistribusikan investasi, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya dapat berkembang secara beriringan.

Perbedaan perkembangan antar daerah terutama disebabkan oleh kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, kebijaksanaan yang dipilih daerah untuk memacu pembangunannya serta adanya konsentrasi kegiatan ekonomi tertentu yang menjadi perhatian daerah, sehingga keadaan ini menyebabkan ketimpangan antar daerah yang tidak dapat dihindari.

2.2.3.1 Kelemahan Perencanaan Pembangunan di Negara Sedang Berkembang

Kelemahan-kelemahan perencanaan pembangunan di Negara Sedang Berkembang:

1. Seringkali lebih merupakan dokumen politik mengenai cita-cita pembangunan.
2. Kurang mendapat dukungan politik yang diperlukan.
3. Kurangnya hubungan antara penyusunan rencana dan para penyusun dengan pelaksanaan rencana dan para pelaksana.
4. Kurangnya data statistik dan informasi hasil-hasil riset untuk mencapai mendasari suatu perencanaan yang baik.
5. Kurangnya penguasaan terhadap tehnik-tehnik perencanaan pembangunan.
6. Kurangnya kemampuan administrasi untuk melaksanakan pembangunan.

2.2.4 Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Pada masa orde lama, strategi pembangunan nasional didasarkan atas pendekatan politik. Hal ini sesuai dengan situasi saat itu yakni masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak memungkinkan

pelaksanaannya difakukan secara baik. Usaha-usaha perencanaan orde lama antara lain:

1. Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi 3 tahun Republik Indonesia (RI) untuk tahun 1947,1949,1950 ditujukan terhadap bidang pertanian, peternakan, perindustrian dan kehutanan.
2. Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, walaupun intinya adalah tetap sektor publik.
3. Tahun 1950-1960 telah disusun suatu Repelita.
4. Tahun 1961-1969 berhasil disusun rencana pembangunan negara sementara berncana, yang meliputi jangka waktu 8 tahun, terbagi atas rencana tahapan 3 tahun dan 5 tahun.
5. Tahun 1966-sekarang mulai disusun Repelita program stabilisasi dana rehabilitasi ekonomi.

Program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pembangunan sejak orde baru sebenarnya berpangkal pada *National Building Approach* dalam kerangka:

1. Jangka panjang : pendekatan pembangunan bangsa yang berdasarkan pada pendekatan pembangunan secara utuh dan terpadu (*Unified and Integrative*) antara berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Jangka menengah : pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih bertitik berat pada pembangunan sektor sosial; serta kelembagaan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ada 2 dokumen perencanaan yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan di Indonesia yaitu:

1. Dokumen Perencanaan Nasional, meliputi:
 - Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
 - Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(RAPBN)
2. Dokumen Perencanaan Daerah, meliputi
 - Pola Dasar Pemabangunan Daerah (PDPD)
 - Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (REPELITADA)
 - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

2.2.5 Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah jika dituangkan dalam bentuk model matematika yaitu merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, kewirausahaan (*entrepreneurship*), transportasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, ekspor, situasi ekonomi

Pembangunan daerah jika dituangkan dalam bentuk model matematika yaitu merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, kewirausahaan (*entrepreneurship*), transportasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, ekspor, situasi ekonomi internasional, pemerintah pusat dan bantuan-bantuan/subsidi pembangunan (Arsyad,1999:300)

2.2.5.1 Pengertian Pembangunan Daerah

Aspek ekonomi daerah mempunyai pengertian (Arsyad ,1999:289):

1. Suatu daerah dianggap suatu ruang ekonomi dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut diantaranya pendapatan perkapita, sosial budaya, geografis maupun dari struktur ekonominya dan sebagainya. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap suatu ekonomi ruang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi maka daerah tersebut dinamakan daerah normal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu administrasi tertentu seperti propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah ini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara.

maka daerah ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administratif

2.2.5.2 Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Blakely (Arsyad,1999:309) terdapat enam tahapan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah yaitu:

1. Pengumpulan dan analisis data
2. Pemilihan strategi pembangunan daerah
3. Pemilihan proyek-proyek pembangunan
4. Pembuatan rencana kegiatan
5. Penentuan rincian proyek
6. Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi

Selanjutnya dalam pengumpulan dan analisis data (Arsyad,1999:309) seharusnya mencakup lima bidang utama yaitu:

1. Evaluasi siklus perencanaan sebelumnya
2. Kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut dan daerah-daerah sejenis lainnya.
3. Penaksiran sumber-sumber daya pembangunan diluar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dan publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada

bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah)

4. Karakteristik dan dinamika kondisi daerah khususnya data perekonomian, infrastruktur, karakteristik fisik dan sosial, institusi dan sebagainya.
5. Keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah lainnya.

2.2.5.3 Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan industri-industri ekspornya dan kenaikan permintaan (*demand*) yang bersifat eksternal di luar daerahnya. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal untuk ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan lapangan kerja (*job creation*) dalam jangka panjang (Richardson, 1977:14). Teori ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah dibedakan atas dua sektor yaitu:

1. Sektor unggulan, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Ini berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor

2. Sektor non unggulan, yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar di daerah itu sendiri.

2.2.6 Konsep dan Teori Analisis

Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan alat analisa S-S (*Shift Share*) dan LQ (*Location Quotient*).

2.2.6.1 Analisis *Shift Share*

Yaitu suatu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang menganalisa bagaimana pangsa masing-masing serta pertumbuhan perekonomian daerah dari tahun ke tahun terhadap perekonomian secara nasional dengan cara membandingkan kinerja dan sektor ekonomi di daerah dengan kinerja dan sektor ekonomi nasional. Teknik shift share ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di suatu daerah dengan laju pertumbuhan sektor perekonomian nasional.

Teknik analisa *shift share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, yaitu pendapatan atau output sektor-sektor ekonomi daerah dalam waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh: pertumbuhan nasional (N); (industri mix) bauran industri (M); keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (share), pengaruh bauran industri disebut *proportional shift* atau

pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (share), pengaruh bauran industri disebut *proportional shift* atau bauran komposisi, dan akhirnya pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan *differential shift* atau *regional share*. Karena itu analisis ini disebut Teknik analisis *shift share*

Bentuk umumnya : $D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$

Untuk sektor i di wilayah j

$$D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij}$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot m$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - m)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

- D = Variabel wilayah
- N = Pertumbuhan nasional
- M = Bauran industri
- C = Keunggulan kompetitif
- Y_{ij} = Pendapatan di sektor i di wilayah j
- Y_{in} = Pendapatan sektor i ditingkat nasional
- * = Pendapatan tahun akhir analisis

Dimana r_{ij} , r_{in} , m mewakili laju pertumbuhan wilayah dan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = \frac{(Y^*_{ij} - Y_{ij})}{Y_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(Y^*_{in} - Y_{in})}{Y_{in}}$$

$$r_n = \frac{(Y^*_n - Y_n)}{Y_n}$$

Keterangan :

- r_{ij} = Laju pertumbuhan pada sektor i diwilayah j
- r_{in} = Laju pertumbuhan pada sektor i disektor regional
- r_n = Laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional

Pengaruh bauran industri untuk sektor i akan positif disemua wilayah ($r_{in} > r_n$) demikian pula pengaruh bauran industri menjadi nol bila ($r_{in} = r_n$), atau negatif bila ($r_{in} < r_n$). Selanjutnya keunggulan kompetitif untuk sektor i diwilayah j dapat positif, nol ataupun negatif, tergantung apakah pertumbuhan regional disetiap sektor lebih cepat daripada ($r_{ij} > r_{in}$), sama dengan ($r_{ij} = r_{in}$) atau lebih lambat ($r_{ij} < r_{in}$) daripada pertumbuhan disektor yang bersangkutan pada tingkat nasional.

Selain itu, suatu keunggulan kompetitif yang positif (negatif) mempunyai implikasi bahwa share suatu wilayah

Kelemahan analisis Shift-share ini secara territorial antara lain:

1. Tidak lebih dari suatu teknik pengukuran untuk mengurangi pertumbuhan variabel wilayah menjadi komponen-komponen.
2. Sederhananya komponen pertumbuhan nasional.
3. Tidak dikembangkannya arti ekonomi oleh komponen *ShiftShare*

Sedangkan kelemahan empiriknya adalah sebagai berikut:

1. Masalah pengaruh –pengaruh yang saling terkait.
2. Tidak ada penjelasan tentang perubahan dalam struktur ekonomi regional selama periode analisis.

2.2.6.2 Analisis *Location Quotient*

Kegiatan ekonomi suatu daerah dalam analisis *Location Quotient* dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Kegiatan ekonomi yang melayani pasar dalam daerah itu sendiri maupun pasar diluar daerah yang bersangkutan. Kegiatan ekonomi seperti ini dinamakan kegiatan ekonomi basis (*basic industry*).
2. Kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri. Kegiatan ekonomi seperti ini dinamakan industri lokal (*non basic industry*)

Dasar pemikiran penggunaan alat analisis ini adalah teori ekonomi dasar yang intinya adalah karena sektor ekonomi basis itu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan hasil ke luar daerah itu mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan kenaikan konsumsi, dan investasi dari daerah tersebut yang pada gilirannya dapat menaikkan dan menciptakan kesempatan kerja. Kenaikan pendapatan di daerah tidak saja menaikkan permintaan terhadap industri basis melainkan juga permintaan terhadap sektor non basis atau industri lokal. Kenaikan pendapatan ini, mendorong kenaikan investasi pada industri lokal.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka sektor ekonomi basislah yang patut dikembangkan di suatu daerah. Oleh karena itu tugas pertama yang kita lakukan adalah menggolongkan tiap ekonomi di suatu daerah apakah termasuk sektor basis atau sektor non basis (industri lokal). Untuk keperluan ini maka digunakan alat analisis *Location Quotient*.

Teknik analisis LQ merupakan salah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang digunakan

untuk menganalisa sektor potensial atau sektor basis dalam perekonomian suatu daerah dengan cara mengukur konsentrasi suatu sektor ekonomi, yaitu dengan membandingkan peranan sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah dengan sektor sejenis dalam perekonomian secara nasional.

Rumus menghitung dengan teknik LQ

$$LQ = \frac{y_i/y_t}{Y_i/Y_t}$$

Keterangan:

- LQ = Koefisien LQ
- y_i = Pendapatan di sektor i di suatu daerah
- y_t = Pendapatan total daerah (PDRB)
- Y_i = Pendapatan di sektor i di tingkat nasional
- Y_t = Pendapatan total ekonomi nasional (PDB)

Klasifikasi LQ:

- $LQ > 1$ Merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor tersebut disuatu daerah lebih besar bila dibandingkan dengan sektor sejenis secara nasional.

- $LQ = 1$ Kemampuan produksi sektor tersebut sama dengan sektor sejenis secara nasional.
- $LQ < 1$ Bukan merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor tersebut lebih kecil bila dibandingkan sektor sejenis secara nasional.

Penelitian ini menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Selera dan pola pengeluaran di suatu daerah dengan daerah lain di Indonesia adalah sama.
2. Setiap penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan terhadap suatu barang dan jasa sama dengan pola permintaan barang dan jasa pada tingkat nasional.
3. Tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang dan jasa di setiap daerah adalah sama.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

3.1 Keadaan Alam

3.1.1 Iklim

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan antara 54/11 – 418/22 M.m sepanjang tahun 1999. Setiap bulannya hujan cenderung turun dan bulan Januari merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak.

Pada tahun 1999 suhu Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menunjukkan variasi antara 23,4 sampai dengan 25,0 derajat Celsius. Sedangkan kelembabannya bervariasi antara 78-88 R.h.

3.1.2 Topologi

Dipantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmas dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih kedalam lagi tanahnya semakin tinggi disertai oleh Bukit Barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 – 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit Barisan yang merupakan tulang punggung mempunyai puncak-puncaknya Gunung Semiring (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107m) dan Gunung Bungkok (2.125 m)

Di sebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng yang menurun dan bagian yang lebih curam di sebelah Timur. Pada lembah daerah Bukit Barisan terdapat daerah- daerah perkebunan karet, kelapa, sawit, dan pertanian terutama kopi, teh dan sayuran. Tanah di Pulau Bangka dan Belitung pada umumnya datar dan sedikit berbukit dan bergunung-gunung.

3.1.3 Keadaan Tanah

Keadaan tanah di Sumatera Selatan terdiri dari 11 jenis yaitu : Organosol , yang terletak di sepanjang pantai dan dataran rendah. Litosol , di pinggiran pegunungan terjal danau Ranau dengan Patahan di sepanjang Bukit Barisan. Aluvial, di sepanjang Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Komering dan punggung Bukit Barisan. Hidromorf, di dataran rendah Musi Rawas dan Muara Enim. Klei Humus, penyebarannya sama dengan jenis tanah Organosol. Regosol, di sekeliling Pantai Timur, di pinggiran pegunungan terjal Danau Ranau dan Kerucut Vulkan. Andosol, di semua kerucut Vulkan muda dan tua, umumnya jenis tanah ini ditemui di wilayah dengan ketinggian lebih 100 m diatas permukaan laut. Rendzina, disekitar kota Baturaja. Latosol, umumnya terdapat di wilayah tanah kering. Leteritik, dataran rendah di sekitar Martapura dan Bangka. Podzolik, di dataran rendah dan di bukit lipatan pegunungan Bukit Barisan.

3.1.4 Hidrologi

Wilayah propinsi Sumatera Selatan mempunyai sungai-sungai besar yang dapat dilayari. Namun saat ini karena proses pendangkalan, tidak dapat dilayari oleh kapal-kapal besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak sungai Musi.

3.1.5 Flora dan fauna

Kekayaan flora di propinsi Sumatera Selatan terdapat bermacam-macam jenis kayu antara lain: Unglen, Merawan, Petanang, Tembesu, Nibung, Gelam, Meranti, Pinus, Kulim, Raflesia, Paku Tiang, Terentang, Sindur, Anggrek dan lain-lain.

Penghuni fauna di propinsi Sumatera Selatan antara lain: Gajah, Badak, Harimau, Tenuk, Beruang, Siamang, Lutung, Simpai, Gugu, Monyet, Rusa, Kijang, Ayam Hutan, Kambing Hutan, Babi, Buaya, Ikan Duyung dan lain-lain.

3.2 Kondisi Penduduk Propinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan angka proyeksi Sensus Penduduk 1990 (SP90), penduduk Sumatera Selatan tahun 1998 berjumlah 7.610,2 ribu jiwa, dan tahun 1999 mengalami peningkatan 1,63 persen atau menjadi 7.734,2 ribu jiwa.

Seks rasio tahun 1999 sebesar 101,75 persen, yang berarti daerah ini mempunyai jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok umur tahun 1995–1999 tampaknya belum banyak mengalami perubahan yang mendasar, dan mempunyai kecenderungan mengelompok pada usia muda yaitu penduduk yang berumur 24 tahun ke bawah. Di tahun 1999 jumlah penduduk yang berusia muda sebesar 4.314,0 ribu jiwa, dan selebihnya yang 3.420,2 jiwa adalah penduduk yang berusia diatas 25 tahun. Secara ekonomis keadaan penduduk yang demikian kurang menguntungkan sebab jumlah tanggungan lebih besar dari pada yang menanggung.

3.2.1 Kondisi Pendidikan Penduduk Propinsi Sumatera Selatan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar penduduk sehingga minat untuk meningkatkan pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah. Peningkatan pendidikan perlu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah dan tenaga guru.

Pada tahun 1998/1999 jumlah murid sekolah Taman Kanak-kanak sebanyak 28.952, SD 1.109.401, SLTP 288.384,

SMU (termasuk kejuruan) 190.394, sedangkan tahun 1999/2000 jumlah murid tersebut berubah menjadi 29.225 murid TK, 1.086.649 murid SD, 293.142 murid SLTP, 188.512 murid SMU (termasuk kejuruan). Dengan demikian selama kurun waktu 2 tahun jumlah murid SD dan SMU (termasuk kejuruan) mengalami penurunan, dan jumlah murid TK dan SLTP meningkat. Sedangkan jumlah sarana pendidikan seperti jumlah sekolah tahun 1999/2000 sebagai berikut: TK sebanyak 612 unit, SD sebanyak 5.809 unit, SLTP sebanyak 901 unit dan SMU (termasuk kejuruan) sebanyak 460 unit.

Sementara jumlah guru tahun 1999/2000 untuk semua tingkatan sekolah secara umum mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga perkembangan jumlah guru ini belum seimbang dengan jumlah perkembangan murid. Gambaran mengenai keseimbangan pertambahan murid dengan pertambahan guru yang telah dicapai selama 1997/1998 samapai dengan 1999/2000 dapat dilihat melalui ratio murid terhadap guru pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Taraf Pendidikan

Taraf Pendidikan	1997/1998	1998/1999	1999/2000
TK	16	15	16
SD	24	23	23
SLTP	17	17	20
SMU *)	14	15	15

Keterangan: *) termasuk kejuruan

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, BPS, 2000

Di tahun 1999/2000 rasio murid terhadap guru untuk tingkat pendidikan SLTP terjadi peningkatan yang cukup mencolok dibandingkan tahun sebelumnya (1998/1999), peningkatannya mencapai 17,65 persen atau rasionya meningkat dari 17 orang menjadi 20 orang murid.

3.2.2 Kesehatan dan Keluarga Berencana Penduduk Propinsi Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal maka kebijaksanaan pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat diarahkan pada:

- Pelayanan Kesehatan bagi penduduk
- Pelayanan Kesehatan terhadap tenaga produktif
- Usaha preventif kesehatan dan sebagainya.

Upaya pemerintah dalam pelayanan kesehatan menitik beratkan kepada masyarakat pedesaan dengan golongan ekonomi lemah sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yaitu

dengan meningkatkan berbagai sarana dan tenaga kerja kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan , seperti rumah sakit , puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 1999 secara umum mengalami peningkatan, hanya jumlah rumah sakit saja yang tetap 35 unit. Sedangkan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu tahun 1999 masing-masing bertambah 1 unit dan 9 unit sehingga jumlah puskesmas di Sumatera Selatan tahun 1999 sebanyak 272 unit dan puskesmas pembantu berjumlah 1.004 unit.

Jumlah tenaga kesehatan seperti dokter (umum,spesialis, gigi), perawat (umum dan gigi), bidan dan tenaga kesehatan lainnya selama tiga tahun terakhir secara umum terjadi penurunan. Jumlah dokter (umum, spesialis dan gigi) pada tahun 1997, 882 orang, tahun 1998 turun menjadi 737 orang dan tahun 1999 menjadi 787 orang.

Sementara jumlah perawat dan bidan serta tenaga kesehatan lainnya pada tiga tahun terakhir sebagai berikut: jumlah perawat dan bidan sebanyak 6.187 orang (1997), 5.209 orang (1998), dan 5.287 orang (1999). Sedangkan jumlah tenaga kesehatan lainnya adalah 11.201 orang (1997), 4.773 orang (1998), dan 5.708 orang (1999).

Jumlah apotik, pabrik obat dan pedagang besar farmasi pada tahun 1999 masing-masing sebesar 134 buah, 1 buah dan 84 buah. Dibandingkan tahun sebelumnya jumlah apotik mengalami

penurunan sebesar 2,19 persen, dan jumlah pedagang besar farmasi meningkat sebesar 9,09 persen.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, peserta keluarga berencana baru di Sumatera Selatan pada tahun 1999 telah melampaui target. Tahun ini mencapai 135.22 persen dari 213.900 peserta yang ditargetkan. Pasangan usia subur (PUS) yang telah berhasil dibina dan masuk sebagai akseptor sebanyak 289.227 orang (lebih besar dari target yang 213.900 orang). Dari seluruh peserta KB baru, alat kontrasepsi terbanyak digunakan adalah suntikan yang mencapai 44,58 persen, disusul pil 33,63 persen dan implan 16,40 persen. Sedangkan sisanya sebesar 5,39 persen menggunakan alat kontrasepsi lainnya.

Keberhasilan keluarga berencana di daerah ini ditunjang oleh beberapa faktor, salah satunya diantaranya adalah pengadaan klinik Keluarga Berencana (KB), dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Perkembangan dari klinik KB dan posyandu dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 1997 klinik KB tercatat 675 unit, tahun 1998 bertambah menjadi 693 unit dan tahun 1999 menjadi 742 unit.

3.3 Kondisi Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka perencanaan pembangunan, tenaga kerja serta angkatan kerja memegang peranan yang sangat penting. Tanpa tenaga kerja program pembangunan tidak akan dapat terlaksana, makin lengkap data tenaga kerja yang tersedia makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan unsur penting di dalam pembangunan, terutama dalam masa otonomi daerah.

Penduduk jika dilihat dari sudut ekonomi dapat menjadi sumber tenaga kerja disamping itu juga dapat menjadi beban pemerintah setempat. Namun jika potensi penduduk tersebut dapat diolah secara efektif maka segi negatifnya akan berkurang.

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam menunjang kualitas dan potensi tenaga kerja. Pada Propinsi Sumatera Selatan pencari kerja yang paling tinggi tingkatannya adalah yang tingkat pendidikannya SMU yaitu sebesar 16.122 orang laki-laki dan 15.196 orang perempuan pada tahun 1999.

Tabel 3.2
Jumlah Pencari Kerja dan Yang Telah di Tempatkan Menurut
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Sumatera Selatan
Tahun 1999

Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja		Telah di Tempatkan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Tidak pernah sekolah	127	205	102	97
Tidak/Belum tamat SD	75	81	66	57
Sekolah Dasar	695	401	560	253
SLTP	2.124	809	728	361
SMU/Sederajat	16.122	15.196	2.528	2.616
Ahli Madya	11.525	2.190	254	213
Sarjana	4.3787	5.611	290	213

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, BPS, 2000

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas dalam status bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk berumur kurang dari 10 tahun meskipun telah melakukan pekerjaan guna memenuhi/ membantu kebutuhan hidup tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Hal ini terjadi karena faktor alamiah seperti kelahiran, kematian, maupun perpindahan yang menyebabkan bergesernya pola kependudukan secara keseluruhan.

Pada tahun 1999 jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan sebanyak 3.422,960 orang. Perkembangan jumlah angkatan kerja selama

lima tahun terakhir (1995-1999) secara umum mengalami peningkatan hanya pada tahun 1996 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Angkatan kerja tahun 1995 berjumlah 3.129.541 orang dan di tahun 1996 menurun menjadi 3.029.281 orang.

Untuk tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing adalah tahun 1997 meningkat sebesar 3,86 persen atau menjadi 3.146.233 orang, tahun 1998 meningkat sebesar 5,61 persen atau menjadi 3.322.723 orang dan tahun 1999 meningkat sebesar 2,71 persen atau menjadi 3.422.960 orang.

Tabel 3.3
Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Sumatera Selatan

Tahun	Angkatan Kerja Yang Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran
1992	2.876.882	71.468	2.948.350	2,42
1993	2.877.706	164.723	3.042.429	5,41
1994	2.897.705	148.761	3.046.466	4,88
1995	2.952.594	176.947	3.129.541	5,65
1996	2.868.594	160.582	3.029.281	5,30
1997	2.987.339	158.894	3.146.233	5,05
1998	3.110.101	222.622	3.322.723	6,68
1999	3.234.760	188.200	3.422.960	5,50

Sumber. Sumatera Selatan Dalam Angka BPS, 2000

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan dampak yang cukup luas. Pihak perusahaan terpaksa

mengurangi tenaga kerjanya demi efisiensi, bahkan tidak sedikit perusahaan yang tidak dapat beroperasi lagi sehingga terpaksa gulung tikar. Akibatnya, tingkat pengangguran pada tahun 1998 meningkat cukup tinggi mencapai 6,68 persen. Namun di sisi lain, krisis ekonomi juga mendorong sebagian orang yang tadinya tidak bekerja terpaksa ikut membantu bekerja/mencari pekerjaan demi keluarganya. Terbukti adanya peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran di tahun 1999. Pada tahun 1999 tingkat pengangguran di daerah ini sebesar 5,50 persen atau lebih kecil 1,19 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,68 persen.

3.4 Kondisi Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan

3.4.1 Koperasi

Koperasi merupakan soko guru dalam sistem perekonomian Indonesia. Perkembangan perkoperasian di daerah ini dapat dikaji melalui beberapa aspek yang relevan antara lain koperasi sebagai unit ekonomi. Jumlah koperasi pada tahun 1999 berjumlah 2.677 unit atau meningkat sebesar 28,33 persen dari tahun sebelumnya, jumlah tersebut terdiri dari 1.945 unit Primer Koperasi, 705 unit KUD dan 30 unit Pusat Koperasi.

Perkembangan koperasi selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Perkembangan Koperasi Propinsi Sumatera Selatan

Tahun	Jumlah Koperasi	Kenaikan (%)
1994	1.728	3,35
1995	1.817	5,15
1996	1.930	6,22
1997	1.893	-1,92
1998	2.086	10,19
1999	2.677	28,33

Sumber Sumatera Selatan dalam Angka, BPS, 2000

Pada tabel diatas tampak bahwa sebagai unit ekonomi koperasi telah berkembang secara berkesinambungan meskipun perkembangannya nampak berfluktuasi. Pada tahun 1999 jumlah anggota koperasi di Sumatera Selatan 773.223 orang yang menyebar pada tiga tingkat koperasi yaitu 56,54 persen anggota di tingkat KUD, 43,33 persen anggota di tingkat primer koperasi, dan sisanya 0,13 persen anggota di tingkat pusat koperasi. Sementara jumlah simpanan dari seluruh anggota koperasi telah mencapai 159,3 juta rupiah meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 101,8 juta rupiah dan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 1999 mencapai 33.353 ribu rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 291,42 persen dibanding periode sebelumnya yang hanya sebesar 8.521 ribu rupiah.

3.4.2 Neraca Perdagangan Sumatera Selatan

Kondisi perdagangan propinsi Sumatera Selatan tahun 1999 yang meliputi ekspor dan impor menunjukkan hal yang kurang mengembirakan. Hal ini tercermin dari besarnya nilai surplus dari neraca perdagangan daerah ini yang menurun drastis dari tahun sebelumnya. Faktor utama menurunnya surplus neraca perdagangan tahun 1999 adalah menurunnya nilai ekspor sebesar 11,72 persen dan meningkatnya nilai impor yang sangat tajam yang mencapai 124,05 persen dari tahun 1998.

Besarnya surplus neraca perdagangan tahun 1999 adalah 219.457,5 ribu dolar AS dan tahun 1998 sebesar 7.266.086,0 ribu. Jadi nilai surplus tahun 1998 besarnya lebih dari 33 kalinya tahun 1999.

3.4.2 Keuangan Daerah

Salah satu sumber dana pembangunan daerah selain berasal dari Pusat (APBN), juga berasal dari daerah (APBD). Kontribusi APBD lebih rendah dibandingkan APBN. Diharapkan dimasa datang akan menjadi sumber yang dominan bagi pembangunan daerah Sumatera Selatan

Realisasi penerimaan APBD Tingkat I Sumatera Selatan tahun 1998/1999 mencapai 295.177,7 juta rupiah atau naik sebesar 11,2 persen bila dibandingkan dengan tahun anggaran 1997/1998 yang sebesar 265.518,4 juta rupiah. Realisasi penerimaan APBD

tahun 1998/1999 tersebut terdiri dari atas penerimaan rutin sebesar 177.542,9 juta rupiah dan penerimaan pembangunan sebesar 117.634,8 juta rupiah.

Tabel 3.5

Komposisi Penerimaan Rutin Tahun Anggaran 1998/1999

Jenis Penerimaan	Nilai (Juta RP)	Persen
PAD	55.256,0	18,72
Bagi Hasil	87.780,2	29,74
Sumbangan dan Bantuan	117.634,8	39,85
Lainnya	34.506,7	11,69
Jumlah	295.177,7	100,00

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka. BPS, 2000

Dari komposisi penerimaan rutin tersebut, tampak bahwa penerimaan berupa sumbangan dan bantuan masih cukup dominan (39,85persen). Angka tersebut memperlihatkan penurunan dibandingkan keadaan tahun anggaran 1997/1998 yang sebesar 37,45 persen.

3.4.3 Anggaran Pembangunan

a. Proyek Dana Asli Daerah

Anggaran pembangunan propinsi Sumatera Selatan yang dibiayai oleh dana asli daerah ini umumnya diarahkan/digunakan untuk pembangunan Dinas/Lembaga yang ada di Sumatera Selatan. Jumlah proyek yang dibiayai tahun 1999/2000 sebanyak 49

proyek, jumlah ini menurun sebesar 43,68 persen dibandingkan tahun 1998/1990.

Realisasi pembangunan proyek tahun 1999/2000 sebesar 78,47 persen dari jumlah anggaran yang telah disediakan sebesar 48.626.95 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 1998/1999 realisasi pembangunan proyek mencapai 94,64 persen dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar 47.706,59 juta rupiah.

b. Proyek Sektoral

Sasaran dari pembangunan proyek sektoral sama dengan pembangunan proyek dana asli daerah, yaitu Dinas atau lembaga yang ada di Sumatera Selatan. Perbedaan yang utama hanya terletak pada sumber dananya, kalau pembangunan proyek sektoral sumber dana (pembiayaan) melalui APBN atau pusat

Tabel 3.6
Rincian Dana Proyek Per Sektor tahun 1998

Sektor Ekonomi	Kredit (Juta Rp)	Persen
Pertanian	1.332.401	42,04
Industri	298.041	9,40
Bangunan/Konstruksi	91.094	2,88
Perdagangan	571.507	18,03
Perhubungan	15.983	0,50
Lainnya	860.287	27,15
Jumlah	3.169.313	100,00

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka.BPS,2000

3.4.5 Pertumbuhan Lapangan Usaha

Dilihat menurut lapangan usahanya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan selama tiga tahun terakhir (1997-1999) mengalami kemerosotan di tahun 1998. Hampir semua lapangan usaha yang menyokong perekonomian Sumatera Selatan di tahun 1998 mempunyai pertumbuhan negatif, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Pertumbuhan Lapangan Usaha di Sumatera Selatan
dalam persen

Lapangan Usaha	1997	1998	1999
Pertanian	2,05	5,55	2,22
Pertambangan dan Galian	3,23	0,33	7,89
Industri Pengolahan	5,12	-9,01	-0,10
Listrik, Gas dan Air Minum	12,50	4,83	4,59
Bangunan	6,24	-34,42	2,37
Perdagangan, hotel dan Restoran	10,26	-10,42	7,29
Angkutan dan Komunikasi	4,86	-8,84	2,56
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,66	-16,16	-8,93
Jasa-jasa	2,52	-0,45	2,41

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, BPS, 2000

3.4.6 Peranan Sektor Ekonomi

Ditinjau dari ikut atau tidaknya peranan migas dalam PDRB atas dasar harga berlaku ternyata menentukan besarnya andil dari masing-masing sektor terhadap total PDRB-nya. Dengan memasukkan migas dalam perhitungan PDRB tahun 1998-1999

terlihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian mempunyai andil terbesar dalam perekonomian daerah Sumatera Selatan, sedangkan menghilangkan migas (tanpa migas) sektor pertanian mempunyai peranan atau andil yang paling besar terhadap PDRB daerah ini seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Peranan Sektor-sektor Ekonomi pada Perekonomian
Sumatera Selatan Tahun 1998-1999
(dalam persen)

Lapangan Usaha	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	1998	1999	1998	1999
Pertanian	19,84	19,90	24,44	25,04
Pertambangan dan Galian	25,10	22,40	13,53	8,69
Industri Pengolahan	21,22	21,39	20,36	20,56
Listrik, Gas dan Air Minum	0,50	0,61	0,61	0,77
Bangunan	4,68	4,99	5,76	6,28
Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,40	16,65	18,97	20,95
Angkutan dan Komunikasi	3,64	4,04	4,48	5,08
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,26	3,84	5,24	4,83
Jasa-jasa	5,36	6,20	6,60	7,80
Total PDRB	100,00	100,00	100,0	100,00

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, BPS, 2000

3.4.7 Perkembangan Pendapatan Regional Perkapita

Pendapatan regional perkapita propinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan pada tahun 1998. Pada tahun 1997 pendapatan regional perkapita 1.610.152 sedangkan pada tahun

1998 sebesar 1.471.045 dan pada tahun 1999 sebesar 1.495.230 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Pendapatan Regional dan Pendapatan Per Kapita Propinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha

Rincian	1997	1998	1999
Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rp)	14.207.488	13.239.321	13.659.311
Penyusutan (Juta Rp)	1.284.374	1.232.892	1.256.363
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Juta Rp)	12.923.114	12.006.429	12.402.948
Pajak tidak langsung Neto (Juta Rp)	968.619	902.613	931.246
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Biaya Faktor (Juta Rp)	11.954.495	11.103.816	11.471.702
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	7.424.450	7.548.250	7.672.200
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rp)	1.913.608	1.753.959	1.780.364
Pendapatan Regional Per Kapita (Rp)	1.610.152	1.471.045	1.495.230

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka.BPS.2000

3.4.8 Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan

Salah satu dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan adalah dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mulai tahun 1993 disajikan berdasarkan seri baru dengan memakai tahun dasar 1993. Dalam seri ini dilakukan penyempumaan baik segi cakupan sektoral maupun metode penghitungannya dibandingkan dengan seri lama yang menggunakan tahun dasar 1983. Dari segi penyajian sektoral, seri baru ini hanya mencakup 9 lapangan usaha yang tahun sebelumnya 11 lapangan usaha.

Dengan tahun dasar 1993 ini, PDRB Sumatera Selatan dengan migas atas dasar harga berlaku tahun 1997-1999 masing-masing sebagai berikut: tahun 1997 sebesar 20.156.022 juta rupiah, tahun 1998 sebesar 33.071.513 juta rupiah, dan tahun 1999 sebesar 36.036.146 juta rupiah

Berdasarkan harga berlaku ini ternyata ada empat lapangan usaha yang selalu memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB-nya seperti disajikan di bawah ini:

Tabel 3.10
Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar
Harga Berlaku (%)

Lapangan Usaha	1997	1998	1999
Pertanian	19,25	19,84	19,90
Pertambangan dan Penggalian	16,30	25,10	22,40
Industri Pengolahan	21,94	21,22	21,39
Perdagangan	18,65	15,40	16,65
Lainnya	23,86	18,44	19,66
Total PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, BPS, 2000

Dilihat berdasarkan harga konstan 1993, PDRB dengan migas daerah tahun 1997 - 1999 masing-masing adalah : 14.207.488 juta rupiah, 13.239.321 juta rupiah, 13.659.311 juta rupiah. Sedangkan distribusi persentasenya disajikan pada tabel 3.11

Tabel 3.11
Distribusi Persentase PDRB Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993
(%)

Lapangan Usaha	1997	1998	1999
Pertanian	18,53	20,99	20,80
Pertambangan dan Penggalian	15,89	17,10	17,89
Industri Pengolahan	20,92	20,42	19,77
Perdagangan	18,81	18,08	18,80
Lainnya	25,85	23,41	22,74
Total PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, BPS, 2000

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dengan migas dalam tahun 1997 - 1999 rata-rata sebesar 0,48 persen. Faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi rata-rata daerah ini relatif kecil diakibatkan anjloknya pertumbuhan ekonomi di tahun 1998 yang mencapai minus 6,81 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tanpa migas dalam periode yang sama mempunyai pertumbuhan rata-rata negatif, yaitu minus 0,34 persen. Seperti halnya dengan keadaan diatas, terpuruknya pertumbuhan ekonomi rata-rata tanpa migas tahun 1997-1999 sebagai akibat dari anjloknya pertumbuhan ekonomi tahun 1998.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber penerbitan, seperti data yang diperoleh dari berbagai sumber penerbitan, seperti data yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan sumber-sumber lain yang terkait dengan obyek yang diteliti dimulai dari tahun 1995 hingga tahun 1999. Data-data tersebut adalah data pendapatan sektor-sektor ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sumatera Selatan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) propinsi di Sumatera pada tahun 1995 hingga tahun 1999.

Dalam penelitian ini digunakan dua alat analisis, yaitu *Shift share* dan *Location Quotient*. Pada analisis *Shift Share* data yang digunakan adalah data PDRB Propinsi Sumatera Selatan dan PDRB propinsi di Sumatera menurut lapangan usaha/sektor ekonomi. Pada analisis *Shift Share* ini membandingkan pertumbuhan sektor ekonomi pada tiap tahun analisis, yaitu pada tahun 1995, 1996, 1997, 1998 dan pada tahun 1999. Pada analisis *Location Quotient*, data yang digunakan adalah data PDRB Propinsi Sumatera Selatan dan PDB Indonesia menurut lapangan

usaha/sektor ekonomi selama lima tahun yaitu sejak tahun 1995 hingga tahun 1999.

4.2 Hasil Analisis *Shift Share* Sektor Ekonomi di Propinsi Sumatera Selatan

Tahun 1995 – 1999

Tabel 4.1 sampai 4.5 menyajikan hasil perhitungan *shift share*.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Shift Share Sektor Ekonomi
Propinsi Sumatera Selatan tahun 1995 (Juta Rupiah)

NO	SEKTOR EKONOMI	$N_{ij} = Y_t - I_{ij} * r_n$	$M_{ij} = Y_t - I_{ij}(r_{in} - r_n)$	$C_{ij} = Y_t - I_{ij}(r_{ij} - r_{in})$	$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$
1	PERTANIAN	153.196	39.886	44.043	237.125
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	131.401	-99.070	67.798	100.139
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	160.681	10.339	54.615	255.636
4	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	5.352	6.216	-2.125	9.442
5	BANGUNAN	60.592	33.026	5.438	99.056
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	140.069	24.645	28.341	193.054
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	39.743	15.925	196	55.864
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	45.037	9.266	-26.139	28.167
9	JASA-JASA	61.665	-22.939	-16.729	21.997

Sumber : PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha Berbagai edisi (data diolah), BPS

Tabel 4.2
Hasil Analisis Shift Share Sektor Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996 (Juta Rupiah)

NO	SEKTOR EKONOMI	$Nij=Ye-tij^*m$	$Mij=Ye-tij(mn-m)$	$Cij=Ye-tij(mj-rm)$	$Dij=Nij+Mij+Cij$
1	PERTANIAN	137.706	20.687	-27.073	131.320
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	112.308	-54.502	131.548	189.354
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	144.825	81.344	25.604	251.773
4	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	4.876	7.300	-660	11.516
5	BANGUNAN	54.762	60.660	-13.378	102.045
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	124.571	-148.083	231.726	208.214
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	35.407	19.119	4.789	59.314
8	KELUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	38.147	17.035	-28.452	26.730
9	JASA-JASA	51.299	-3.927	-22.236	25.136

Sumber: lihat tabel 4.1

Tabel 4.3
Hasil Analisis Shift Share Sektor Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1997 (Juta Rupiah)

NO	SEKTOR EKONOMI	$Nij=Ye-tij^*m$	$Mij=Ye-tij(mn-m)$	$Cij=Ye-tij(mj-rm)$	$Dij=Nij+Mij+Cij$
1	PERTANIAN	93.730	210	-41.044	52.896
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	79.431	-121.646	112.887	70.672
	INDUSTRI PENGOLAHAN	102.705	13.376	28.690	144.771
4	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	3.568	23.028	-14.323	12.273
5	BANGUNAN	39.084	34.494	-6.452	67.126
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	88.038	38.237	122.403	248.678
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	25.028	24.903	-16.477	33.454
8	KELUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	25.614	30.014	-22.773	32.856
9	JASA-JASA	34.053	6.237	-16.691	23.599

Sumber: lihat tabel 4.1

Tabel 4.4
Hasil Analisis Shift Share Sektor Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1998 (Juta Rupiah)

NO	SEKTOR EKONOMI	$N_{ij}=Y_t-I_{ij}^*r_m$	$M_{ij}=Y_t-I_{ij}(m)-r_b$	$C_{ij}=Y_t-I_{ij}(c)+r_m$	$D_{ij}=N_{ij}+M_{ij}+C_{ij}$
1	PERTANIAN	-205.985	286.061	65.928	146.004
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	-176.583	-2.922	186.996	7.491
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	-232.501	-42.175	6.828	-267.847
4	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	-8.644	16.301	-2.318	5.339
5	BANGUNAN	-89.419	-245.320	-58.637	-393.377
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	-209.046	214.919	-284.200	-278.327
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	-56.515	2.069	-602.029	-656.475
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	-57.731	-85.101	23.574	-119.257
9	JASA-JASA	-75.179	-168.160	239.007	-4.332

Sumber : lihat tabel 4.1

Tabel 4.5
Hasil Analisis Shift Share Sektor Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1999 (Juta Rupiah)

NO	SEKTOR EKONOMI	$N_{ij}=Y_t-I_{ij}^*r_m$	$M_{ij}=Y_t-I_{ij}(r_m)-r_m$	$C_{ij}=Y_t-I_{ij}(c)+r_m$	$D_{ij}=N_{ij}+M_{ij}+C_{ij}$
1	PERTANIAN	59.124	79.349	-76.667	61.807
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	48.181	-32.308	162.690	178.563
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	57.530	-55.657	-4.574	-2.702
4	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	2.464	6.290	-3.436	5.318
5	BANGUNAN	15.948	-35.027	36.842	17.763
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	50.928	42.198	81.427	174.553
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.401	1.103	606.939	609.503
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	13.162	-242.882	175.471	-55.249
9	JASA-JASA	20.353	271.205	-268.510	23.048

Sumber: lihat tabel 4.1

Tabel 4.6

Hasil Analisis Shift Share Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1995 – 1999

NO	SEKTOR EKONOMI	$N_{ij} - Y_{ij} * r_n$	$M_{ij} - Y_{ij}(r_{in} - r_n)$	$C_{ij} - Y_{ij}(r_{ij} - r_n)$	$D_{ij} - N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$
1	PERTANIAN	74.536	399.697	-82.207	392.027
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	60.789	-189.922	575.213	446.080
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	78.389	-4.918	52.523	125.995
4	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	2.639	55.173	-23.366	34.446
5	BANGUNAN	29.641	-201.486	-34.598	-206.443
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	67.426	118.233	167.459	353.118
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	19.165	55.442	-28.810	45.796
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	20.648	-298.783	163.215	-114.920
9	JASA-JASA	27.767	35.197	4.487	67.451
	TOTAL	381.000	-31.366	793.916	1.143.550

Sumber: lihat tabel 4.1

Keterangan : N_{ij} (pertumbuhan nasional)
 M_{ij} (bauran industri)
 C_{ij} (keunggulan kompetitif)
 D_{ij} (variabel wilayah)

Dari tabel – tabel yang disajikan terlihat pengaruh pertumbuhan nasional (N_{ij}) memberikan efek yang positif pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 dan tahun 1999 sedangkan untuk tahun 1998 pertumbuhan nasional (N_{ij}) mempunyai nilai yang negatif. Misalnya pada tahun 1998 nilai N_{ij} sebesar Rp -8.644 untuk listrik dan air minum dan pada tahun 1999 nilainya sebesar Rp 2.464

Secara keseluruhan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 komponen pertumbuhan regional mempunyai nilai yang positif, berarti pertumbuhan sektor ekonomi daerah Sumatera Selatan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah lain di Sumatera.

Komponen bauran industri (M_{ij}) memberikan efek yang positif terhadap pertumbuhan PDRB pada tahun 1995 dan 1997, hanya pada tahun

1995 sektor jasa-jasa, pertambangan dan galian memberikan nilai yang negatif. Sedangkan tahun 1998 dan 1999 komponen bauran industri mempunyai nilai yang negatif.

Bila dilihat dari tahun 1995 sampai dengan 1999 komponen bauran industri mengurangi pendapatan daerah Sumatera Selatan.

Dilihat dari aspek keunggulan kompetitif, pada tahun analisis 1995 sampai tahun 1999 rata-rata memberikan efek yang negatif. Tapi tidak semua sektor memberikan efek yang negatif, seperti sektor pertambangan dan galian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu bernilai positif. Berarti kedua sektor ini berkembang sedikit lebih cepat daripada rata-rata regional untuk kedua sektor itu.

Dilihat dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 pengaruh keunggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dalam perubahan pendapatan daerah Sumatera Selatan yang mempunyai nilai negatif dijumpai di sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Jadi ada empat sektor yang pangsaanya turun selama periode waktu tersebut.

4.3 Hasil Analisis *Location Quotient* Sektor Ekonomi di Propinsi Sumatera

Sciatan

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dengan pendekatan PDRB atas dasar harga konstan 1993 diperoleh hasil dengan kecenderungan yang berubah – ubah. Dapat didefinisikan sektor yang menjadi sektor unggulan dari tahun 1995 sampai tahun 1999 yaitu sector bangunan dan sector perdagangan, hotel dan restoran. Sektor keuangan, persewaan dan komunikasi menjadi sector yang diunggulkan pada tahun 1995,1998 dan 1999

Pada tahun 1995 dan 1998 sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa ikut menjadi sektor yang diunggulkan. Begitu juga sektor listrik, gas dan air minum pernah menjadi sektor yang diunggulkan pada tahun 1995.

Dalam hal ini sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian serta sektor pengangkutan dan komunikasi belum pernah menjadi sektor yang diunggulkan, dan belum dapat bersaing dengan propinsi lain di Sumatera.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sektor yang menjadi unggulan dan perubahan peranan masing-masing sektor ekonomi pada tahun 1995 – 1999 di Propinsi Sumatera Selatan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Analisis *Location Quotient* Sektor Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1995 – 1999

NO	SEKTOR EKONOMI	TAHUN				
		1995	1996	1997	1998	1999
1	PERTANIAN	0,96	0,88	0,87	0,99	0,86
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	0,75	0,73	0,78	0,94	0,90
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	1,01	0,95	0,96	1,07	0,96
4	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	1,07	0,98	0,87	0,95	0,83
5	BANGUNAN	1,50	1,37	1,37	1,41	1,33
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1,30	1,34	1,41	1,40	1,29
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	0,75	0,69	0,68	0,75	0,66
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1,09	0,97	0,94	1,09	1,41
9	JASA-JASA	1,01	0,91	0,90	1,34	0,94

Sumber: PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha Berbagai edisi (data diolah),BPS

Tabel 4.8
Perubahan Hasil Perhitungan LQ Sektor Ekonomi
Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1995 – 1999

NO	SEKTOR EKONOMI	TAHUN				
		1995	1996	1997	1998	1999
1	PERTANIAN	+	-	-	+	-
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	+	-	+	+	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	+	-	+	+	-
4	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	+	-	-	+	-
5	BANGUNAN	+	-	*	+	-
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	+	+	+	-	-
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	+	-	-	+	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	+	-	-	+	-
9	JASA-JASA	+	-	-	+	-

Sumber: lihat tabel 4.7

Keterangan: (+) kenaikan, (-) penurunan, (*) tetap

Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan di Propinsi Sumatera Selatan yaitu sektor bangunan dan sector perdagangan hotel dan restoran.

Sektor yang berpotensi ini layak untuk dikembangkan karena nilai LQ >1 sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, karena

jika dikembangkan lebih luas maka akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Disamping itu masih ada sektor yang kurang potensial untuk dikembangkan karena nilai $LQ < 1$, apabila dikembangkan hanya dapat pada keadaan tertentu dan tidak dapat berlangsung dalam jangka panjang.

4.4 Penilaian Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis *shift share* dan LQ diperoleh sektor – sektor unggulan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Hasil Penilaian Berdasarkan Analisis *Shift Share* dan LQ Sektor Ekonomi di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1995 – 1999

NO	SEKTOR EKONOMI	S-S	LQ	Kompetitif
1	PERTANIAN	-	-	-
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	+		Kompetitif
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	+	-	Kompetitif
4	LISTRIK, GAS & AIR MINUM	-	-	-
5	BANGUNAN	-	+	Surplus
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	+	+	Kompetitif, surplus
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	-	-	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	+	-	Kompetitif
9	JASA-JASA	+	-	Kompetitif

Sumber: tabel 3.6 dan 4.7

Ket : S-S : (+) kompetitif
 (-) kurang kompetitif
 LQ : (+) unggulan
 (-) non unggulan

Dari tabel diatas, sektor – sektor yang dapat dijadikan prioritas untuk menjadi sektor unggulan dalam pengembangan perekonomian Propinsi Sumatera Selatan adalah:

Sektor Perdagangan , Hotel dan Restoran

Sumatera Selatan mempunyai wilayah yang cukup luas meliputi 113.339,07 km² dan dengan pusat-pusat produksi yang tersebar serta banyak menghasilkan komoditi tambang, galian dan sebagainya. Dengan adanya potensi tersebut maka kegiatan perdagangan Sumatera Selatan berkembang dengan pesat dan mempunyai peranan yang dominan terhadap struktur ekonomi Sumatera Selatan. Wilayah Sumatera Selatan dilingkari oleh laut dan selat sehingga peranan pelabuhan sebagai pintu gerbang arus barang makin menonjol.

Kondisi perdagangan propinsi Sumatera Selatan tahun 1999 yang meliputi ekspor dan impor menunjukkan hal yang kurang mengembirakan. Hal ini tercermin dari besarnya nilai surplus dari neraca perdagangan daerah ini yang menurun drastis dari tahun sebelumnya. Faktor utama menurunnya surplus neraca perdagangan tahun 1999 adalah menurunnya nilai ekspor sebesar 11,72 persen dan meningkatnya nilai impor yang sangat tajam yang mencapai 124,05 persen dari tahun 1998.

Besarnya surplus neraca perdagangan tahun 1999 adalah 219.457,5 ribu dolar AS, dan tahun 1998 sebesar 7.266.086,0 ribu dolar AS. Jadi nilai surplus tahun 1998 besarnya lebih dari 33 kalinya tahun 1999.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Menurut uraian informasi data serta hasil analisis *Shift Share* dan analisis *Location Quotient* pada sektor-sektor ekonomi Propinsi Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis *shift share* terlihat pengaruh pertumbuhan nasional (Nij) memberikan efek yang positif pada sebagian besar tahun analisis. Komponen bauran industri (Mij) memberikan efek yang positif terhadap pertumbuhan PDRB untuk tahun 1995, 1997, 1998 dan tahun 1999.
2. Bila dilihat dari aspek keunggulan kompetitif, hampir pada tiap tahun memberikan efek yang negatif. Tapi tidak semua sektor memberikan efek yang negatif, pada sektor pertambangan dangalian serta sektor perdagangan hotel dan restoran selalu bernilai positif.
3. Berdasarkan analisis potensi yang dimiliki daerah, dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* terhadap sembilan sektor ekonomi di Propinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa sektor yang potensial (sektor basis) dan dapat diandalkan dalam pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 1995 – 1999 yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan hotel dan restoran.

4. Jika dilihat dari hasil analisis LQ dan S-S terhadap sektor ekonomi Propinsi Sumatera Selatan maka dapat dilihat bahwa sektor yang diunggulkan dan kompetitif yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran.

5.2 Saran

Kebijakan ekonomi regional bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya tidaknya berusaha untuk mengurangi perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah yang pertumbuhannya lambat, serta mengupayakan agar daerah yang masih terbelakang dapat mengejar ketinggalannya. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan serta mencapai sasaran tersebut diatas adalah:

1. Menempatkan sektor-sektor ekonomi pada proporsi yang sebenarnya atau sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada, kemampuan fisik dan sosial ekonomi dari wilayah tersebut, terutama sektor basis agar bekerja sesuai dengan mekanisme pasar.
2. Menempatkan pelaksanaan orientasi pembangunan berdasarkan pada potensi dan kondisi daerah setempat dengan mengikutsertakan pelaku-pelaku ekonomi lokal yang potensial dan berkualitas.
3. Agar pembangunan regional mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, maka dalam pengelolaan sumber daya tersebut hendaknya mempertimbangkan aspek ekonomi lingkungan yang berimbang untuk mempertahankan kelestarian sumber dayanya

4. Lebih memantapkan lagi program keterkaitan antar sektor ekonomi baik itu sektor basis maupun sektor non basis, sehingga pertumbuhan semua sektor dapat tumbuh dan berkembang minimal setara secara nasional.